

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Chomzah, Ali, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002).
- Darus Badrulzaman, Mariam, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni 1983).
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008).
- Hermit, Herman, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Wakaf*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, (Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka, 2011).
- Maria S.W Sumardjono dan Nurhasan Ismail dan Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta: Kompas, 2008).
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Pencabutan Hak Pembebasan Hak dan Pengadaan Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Muliawan, Jarot Widya, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in1 In The Land Acquisition*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2016).
- Rubaie, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Banyumedia, 2007).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Tehupeiory, Aartje, *Makna Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2017).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Tentang Pertanahan.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Artikel Ilmiah

Hengky Andora, “*Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*”, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No.2 April 2016), halaman 107-108.

Hukum dan Dinamika Masyarakat, “*Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)*”, (E-Jurnal Untag-smg, Vol 10 No.2 April 2013), halaman 212.

Iga Gangga Santi Dewi, “*Konflik Tentang Ganti Rugi Non Fisik Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*”, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017), halaman 284.

LAMPIRAN